

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan

Pemberitaan kenaikan tunjangan Guru yang diumumkan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 28 November 2024 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Peneliti melakukan analisis resepsi terhadap khalayak Guru untuk mengetahui resepsi pada objek penelitian yaitu kenaikan tunjangan profesi Guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Diskusi terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mendapatkan data dari lapangan disertai juga wawancara dengan Triangulator yang merupakan Pengamat Pendidikan. Berdasarkan pengumpulan data diskusi terpumpun dengan metode analisis resepsi sebelas informan khalayak Guru peneliti menemukan fakta temuan pembentukan makna menggunakan teori *encoding – decoding* Stuart Hall.

Temuan fakta pada diskusi terpumpun kemudian divalidasi oleh triangulator yang merupakan seorang Pengamat Pendidikan yang berasal dari Perhimpunan Pendidik & Guru (P2G). Triangulasi sumber dilakukan untuk memberikan validasi terhadap resepsi khalayak yang terdiri dari posisi dominan, posisi negosiasi dan posisi oposisi. Peneliti menjabarkan temuan fakta yang diselaraskan dengan hasil wawancara bersama Triangulator.

Terdapat lima informan yaitu Wendi, Ega, Chayriah, Elanda dan Dwi Ulfa yang berada pada posisi dominan hegemoni melihat pemberitaan kenaikan tunjangan profesi Guru. Pengumuman kenaikan yang disiarkan pada pemberitaan tvOne disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat di awal periode kekuasaannya sebagai pemenang pemilihan presiden tahun 2024.

Pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 28 November. Menggunakan kekuasaan Pemerintah dan fungsi dari Kementerian

Pendidikan Dasar dan Menengah serta latar panggung besar yang dominan dengan warna biru dari logo Tut Wuri Handayani, Presiden Prabowo secara lantang di depan ribuan khalayak Guru yang hadir di Velodrome, mengumumkan kenaikan tunjangan Guru.

Kelima informan menerima gagasan pada pemberitaan kenaikan tunjangan Guru sebagai komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan potensi Guru. Latar belakang kesejahteraan Guru ASN & Non-ASN yang belum merata pada sekolah negeri dan swasta menjadikan kenaikan tunjangan profesi ini sebagai komitmen Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan Guru di Indonesia. Sehingga khalayak Guru Non-ASN menyambut kenaikan tunjangan ini dengan gembira.

Pada posisi negosiasi terdapat tiga informan yakni Elanda, Dian & Firman yang merupakan Guru Non-ASN. Selain menerima gagasan dari pemberitaan kenaikan tunjangan Guru ASN & Non-ASN dengan kode-kode yang tersusun secara tersirat, terdapat harapan lain yang dipengaruhi oleh wawasan serta latar belakang informan. Setelah melakukan diskusi dengan ketiga informan, terdapat harapan kenaikan yang tidak ada sebelumnya hingga tahun 2025, diharapkan dapat direalisasikan lebih cepat. Kebijakan yang tidak konsisten menyebabkan khalayak Guru Non-ASN hanya bergantung kepada yayasan atau lembaga pendidikan tempat mereka mengajar. Sehingga informan menilai kebijakan kenaikan tunjangan profesi Guru ASN & Non-ASN sebagai hal yang baik namun terlambat.

Pada posisi negosiasi juga didapatkan informan yang memberikan usulan terhadap sistem pembayaran tunjangan profesi Guru ASN & Non-ASN yang belum sempurna. Pembayaran yang tidak menentu dengan sistem setiap tiga bulan hingga setiap enam bulan ditetapkan secara aturan agar dapat tepat waktu. Harapan ini didasarkan pada pengalaman informan yang menjadi tidak fokus dalam melakukan kegiatan belajar – mengajar karena harus membagi fokus dengan usaha-usaha memenuhi kebutuhan hidup.

Terdapat tiga informan yang berada pada posisi oposisi karena menilai pemberitaan kenaikan tunjangan Guru ASN & Non-ASN pada tahun 2025 hanya merupakan bentuk komunikasi politik. Gagasan pemerataan kesejahteraan serta kode-kode yang disusun oleh komunikator tidak dimaknai sebagai gagasan yang berpihak pada khalayak Guru.

Latar belakang dan wawasan mengenai komunikasi politik digunakan dalam melakukan proses *decoding* pesan pemberitaan kenaikan tunjangan Guru ASN & Non-ASN pada tahun 2025 yang dinilai ini hanya “omon-omon” belaka. Setiap pergantian kekuasaan atau pemilihan Presiden, kesejahteraan Guru kerap kali menjadi materi komunikasi pemasaran dari para Kontestan politik yang mencalonkan diri sebagai Calon Presiden & Wakil Presiden. *Decoding* makna yang terbentuk didasarkan pada pengalaman individu yang hingga saat ini masih merasa tidak ada kesetaraan kesejahteraan dan kompetensi Guru di Indonesia.

Seperti pada wawancara Triangulator bahwa Pemerintah seharusnya tidak mengumumkan kenaikan tunjangan Guru ASN & Non-ASN sebagai materi komunikasi pemasaran. Melainkan aturan mengenai tunjangan Guru & Dosen telah diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tentang Dosen & Guru. Selain sebagai materi komunikasi publik, khalayak Guru yang berada pada posisi oposisi juga ditemukan fakta bahwa proses sertifikasi merupakan hambatan bagi Guru ASN & Non-ASN yang telah berusia lanjut dan memiliki masa pengabdian di atas sepuluh hingga dua puluh tahun. Sistem teknologi dan administrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan bagi khalayak Guru di seluruh Indonesia.

Hal ini sejalan dengan fakta wawancara dengan Triangulator bahwa sistem pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi Guru merupakan proses yang rumit. Sehingga dapat membuat khalayak Guru gagal dalam menjalani proses sertifikasi sebagai syarat mutlak mendapatkan tunjangan profesi pendidik. Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini tidak semua khalayak Guru menerima gagasan kenaikan tunjangan yang dilakukan Pemerintah di tahun 2025 sebagai makna yang diterima sepenuhnya. Terdapat harapan yang masih harus dipenuhi oleh Pemerintah dan pemangku

kepentingan di sektor Pendidikan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada Guru sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen.

5.2 Kendala dan Keterbatasan

Selama penelitian berlangsung, peneliti menyadari terdapat kendala seperti topik yang dapat dikembangkan menjadi beberapa topik dari subjek penelitian yang dipilih yaitu kenaikan tunjangan Guru di tahun 2025.

Namun peneliti menetapkan analisis yang dilakukan pada resepsi khalayak Guru adalah makna yang diterjemahkan setelah melihat video berita kenaikan tunjangan Guru ASN & Non-ASN yang diumumkan oleh Presiden Prabowo pada peringatan Hari Guru Nasional 28 November 2024.

Keterbatasan wawasan pada objek pada penelitian ini merupakan tantangan bagi peneliti yang berasal dari latar belakang komunikasi pemasaran. Namun keterbatasan ini peneliti jadikan sebagai peluang untuk melihat resepsi dalam ruang lingkup kecil di wilayah Jakarta Timur dan mendengarkan secara lebih detail makna yang dibentuk oleh para informan. Karena komunikasi pemasaran dapat digunakan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan Guru dengan pendekatan komunikasi krisis bagi Pemerintah yang dalam hal ini menjadi regulator.

5.3 Saran dan Implikasi

5.3.1 Saran Teoritis

Peneliti memberikan saran bagi civitas akademika yang memiliki penelitian sejenis dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan dan pengembangan topik pada penelitian selanjutnya. Serta pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan untuk meneliti komunikasi pemasaran Pemerintah yang dikelola oleh Negara dalam menjalankan program-program kerja strategis sehingga dapat mengukur efektifitas program yang dilakukan Pemerintah dengan komunikasi yang diberikan kepada khalayak masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Saran bagi pemangku kepentingan dunia Pendidikan Indonesia dapat menggunakan teori atau konsep dari Komunikasi Pemasaran agar setiap program kerja yang dilakukan Pemerintah atau Organisasi dapat menjadi bukti efektif bahwa dunia pendidikan Indonesia sedang melakukan perbaikan menuju Indonesia Emas 2045.

5.3.2 Saran Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan aspirasi bagi khalayak Guru yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan di Indonesia. Fakta-fakta yang ditemukan diharapkan dapat menjadi temuan awal bagi peningkatan kesejahteraan serta kompetensi Guru bagi seluruh pemangku kepentingan dunia Pendidikan Indonesia.